

**Kenikmatan Visual Khalayak Ketika Menonton Adegan Kekerasan
Pada Film Killers**

Anindya Anandita

**Penggambaran Disfungsi Seksual Vaginismus pada Tokoh Utama
Perempuan dalam Film Honeymoon**

Dea Anyudhita

**Analisis dan Evaluasi Studi Kebijakan Komunikasi Terhadap
Kebijakan Pemblokiran Situs Media Online di Indonesia**

Hedy Diah Syahputri

**Penerimaan Pemirsa Perempuan Terhadap Fenomena Poligami
dalam Sinema Bollywood "Jodha Akbar"**

Radyastuti

**Perang dan Perempuan: Representasi Perempuan dalam Film
Darah Garuda Menggunakan Perspektif Poskolonialisme**

Rifka Putriandini

**Konstruksi Budaya Kematian dalam Forum Disturbing Pictures
KASKUS**

**(Analisis Semiotika Sosial Terhadap Foto Kematian dan Reply
Pengguna Forum Disturbing Pictures dalam Thread)**

Sandra Septya Mega

**Pengungkapan Informasi Privat Anak yang Memiliki Pasangan
Beda Agama Untuk Melanjutkan ke Jenjang Pernikahan kepada
Orang Tua**

Andita Ayudya C.

Representasi Anak-anak Papua dalam Film Di Timur Matahari

Lailatul Khoiriyah

**Analisis Pemberitaan Kasus Korupsi pada Media Lokal
Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja**

Olivia Lewi Pramesti

**Kebijakan Ruang Publik dan Media Luar Ruangan dalam
Perspektif Kebijakan Negara: Esai Komparatif Indonesia, Hong
Kong, Porto Alegre, dan UK**

Rendy Pahrun Wadipalapa

INSIGHT

**Journal of Communication
and Media Studies**

Tahun XIII - Nomor 2, Juli - Desember 2016

Desain & Tata Letak
Wimardana Herdanto

Diterbitkan Oleh:
DEPARTEMEN KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
Diterbitkan pertama kali oleh
Departemen Komunikasi FISIP UNAIR
Surabaya, Februari 2010

ISSN 977-208-650-700-1

Insight

Journal of Communication & Media Studies

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung

Dekan FISIP Universitas Airlangga

Pemimpin Umum

Dr. Yayan Sakti Suryandaru, S.Sos., M.Si

Mitra Bestari

1. Mario Antonius Birowo, Ph. D
(Univ. Atma Jaya Yogyakarta)
2. Drs. I Gusti Ngurah Putra, MA
(Univ. Gadjah Mada Yogyakarta)
3. Dr. Hpsari Dwiningtyas Sulistyani, MA
(Univ. Diponegoro Semarang)

Pemimpin Redaksi

Rendy Pahrun Wadipalapa, S.Ikom., MA

Sekretaris Redaksi

Nisa Kurnia, S.Ikom., M.Medkom

Bendahara

Dr. Santi Isnaini, S.Sos., MA

Redaksi Pelaksana

1. Dra. Liestianingsih D., MA
2. Drs. Suko Widodo, MA
3. Kandi Aryani, S.Sos., MA
4. Nurul Ratna Sari, S.IP., M.Comm

Editor

Irfan Wahyudi, S.Sos., M.Comm

Alamat Redaksi

Departemen Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga Kampus B

Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286
Telp. 031 5034015, 5011744, 5047754
Fax. 031 5012442

DAFTAR ISI

Kenikmatan Visual Khalayak Ketika Menonton Adegan Kekerasan Pada Film Killers Anindya Anandita	1
Penggambaran Disfungsi Seksual Vaginismus pada Tokoh Utama Perempuan dalam Film Honeymoon Dea Anyudhita	9
Analisis dan Evaluasi Studi Kebijakan Komunikasi Terhadap Kebijakan Pemblokiran Situs Media Online di Indonesia Hedy Diah Syahputri.....	19
Penerimaan Pemirsa Perempuan Terhadap Fenomena Poligami dalam Sinema Bollywood “Jodha Akbar” Radyastuti.....	31
Perang dan Perempuan: Representasi Perempuan dalam Film Darah Garuda Menggunakan Perspektif Poskolonialisme Rifka Putriandini	44
Konstruksi Budaya Kematian dalam Forum Disturbing Pictures KASKUS (Analisis Semiotika Sosial Terhadap Foto Kematian dan Reply Pengguna Forum Disturbing Pictures dalam Thread) Sandra Septya Mega	54
Pengungkapan Informasi Privat Anak yang Memiliki Pasangan Beda Agama Untuk Melanjutkan ke Jenjang Pernikahan kepada Orang Tua Andita Ayudya C	64
Representasi Anak-anak Papua dalam Film Di Timur Matahari Lailatul Khoiriyah.....	75
Analisis Pemberitaan Kasus Korupsi pada Media Lokal Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja Olivia Lewi Pramesti.....	84
Kebijakan Ruang Publik dan Media Luar Ruang dalam Perspektif Kebijakan Negara: Esai Komparatif Indonesia, Hong Kong, Porto Alegre, dan UK Rendy Pahrun Wadipalapa.....	92

Analisis Pemberitaan Kasus Korupsi pada Media Lokal Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja

Olivia Lewi Pramesti
olivia.lewi@yahoo.com

Penetapan mantan Bupati Bantul periode 1999-2004 dan 2005-2010 sebagai tersangka korupsi dana Persatuan Sepakbola Indonesia Bantul (Persiba) sebesar 12,5 miliar menggegerkan media lokal di Yogyakarta. Peristiwa yang terjadi pada 18 Juli 2013 ini, memiliki nilai berita penting dan aktual karena melibatkan pejabat publik. Selain mantan bupati, Idham juga menjadi ketua umum DPP PDI Perjuangan dan calon legislator DPR dari DIY kala itu. Kaitannya dengan kasus korupsi ini, tentu saja media memiliki peranan yang sangat penting. Selain tugasnya sebagai pilar keempat, media juga harus menyelamatkan publik dari koruptor. Surat kabar lokal seperti *Kedaulatan Rakyat* dan *Tribun Jogja* adalah dua media lokal yang *intens* dalam memberitakan. Meski pemberitaan sama-sama memberitakan soal Idham Samawi, namun dua media ini memiliki kecenderungan yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis framing Robert Entman sebagai analisis di level teks serta wawancara dengan pihak redaksional untuk level konteksnya. Analisis framing ini untuk mengetahui apa kepentingan sebuah media dalam memberitakan kasus tertentu. Hasil penelitian di level teks dan konteks menunjukkan bahwa *Kedaulatan Rakyat* dan *Tribun Jogja* melakukan framing berbeda atas kasus korupsi dana Persiba. *Kedaulatan Rakyat* memberikan pandangan positif atas kasus Idham ini dan mengarahkan opini publik bahwa tindakan Idham tidak bersalah. Sementara *Tribun Jogja* berada dalam posisi netral dimana *Tribun* tetap memberitakan Idham sebagai tersangka dan Idham masih dicintai partai serta penggemarnya.

Keywords: analisis framing, Idham Samawi, korupsi dana Persiba, media lokal

PENDAHULUAN

Pada Kamis 18 Juli 2013 masyarakat di Yogyakarta digegerkan oleh pemberitaan mengenai penetapan Idham Samawi, mantan Bupati Bantul periode 1999-2004 dan 2005-2010 sebagai tersangka korupsi dana Persatuan Sepakbola Indonesia Bantul (Persiba) sebesar 12,5 miliar. Penetapan tersangka Idham ini tentunya menjadi berita baru dan penting karena melibatkan pejabat publik. Selain mantan bupati, Idham juga menjadi ketua umum DPP PDI Perjuangan dan calon legislator DPR dari DIY kala itu. Dalam bahasa jurnalistik, berita ini memiliki nilai berita yaitu

significance (penting), *timeliness* (terkini), dan *prominence* (keterkenalan).

Berita korupsi di media massa merupakan bagian dari liputan politik. Seperti dikutip dari buku Ibnu Hamad yang berjudul *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, peristiwa politik selalu menarik media massa. Hal ini disebabkan karena dua faktor yaitu politik berada di era mediasi dimana media mustahil dipisahkan dari media massa. Para aktor politik selalu berusaha menarik wartawan agar aktivis politiknya diliput media. Alasan kedua menyangkut faktor nilai berita. Peristiwa politik, aktivis politik, dan kegiatan politik lainnya selalu

menarik bagi media. Tak jarang peristiwa politik selalu menjadi *headline* surat kabar bahkan mendominasi berita di sebuah media. (Hamad, 2004:1)

Berita korupsi soal Idham Samawi di media ternyata mendapat sorotan dari media lokal di Yogyakarta. Pemberitaan soal Idham ramai dibicarakan media. Surat kabar lokal seperti *Kedaulatan Rakyat* dan *Tribun Jogja* adalah dua media lokal yang *intens* dalam memberitakan. Penelitian ini bermula dari ketertarikan peneliti melihat kecenderungan berita yang ada di dua media tersebut. Meski pemberitaan sama-sama memberitakan soal Idham Samawi, namun dua media ini memiliki kecenderungan yang berbeda.

Peneliti menduga pemberitaan di *Kedaulatan Rakyat* dipengaruhi oleh faktor lain yaitu sosok Idham yang memiliki hubungan dekat dengan *Kedaulatan Rakyat*. Idham Samawi saat ini menjabat sebagai penasehat dari koran lokal tersebut. Sementara, di koran *Tribun Jogja*, Idham tidak memiliki keterkaitan apa pun.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis framing sebagai analisis teksnya dan dilanjutkan dengan metode wawancara pada bagian redaksional media untuk membedah level konteksnya. Sobur (2001:162) menyatakan analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang ini menentukan fakta mana yang akan diambil dan dibuang, fakta mana yang ditonjolkan dan tidak hingga akhirnya terbentuk *angle* atau fokus pemberitaan.

Kedaulatan Rakyat dan *Tribun Jogja* dipilih berdasarkan alasan sebagai berikut. *Kedaulatan Rakyat* adalah koran tertua dan terkuat di Yogyakarta yang

menjadi acuan masyarakat Yogyakarta. Berdasarkan data oplah dari pihak redaksi, oplah *Kedaulatan Rakyat* pada 2011 ini bisa mencapai 60.000 – 80.000 per hari. Tak heran oplah penjualan ini merajai pasar Yogyakarta. *Kedaulatan Rakyat* yang identik disebut dengan “Korannya *Wong Jogja*” tentu saja lebih banyak menempatkan berita lokal Yogyakarta dalam pemberitannya.

Tribun Jogja merupakan pers daerah dari grup Kompas Gramedia. *Tribun Jogja* lahir pada 11 April 2011. Sebagai media baru di Yogyakarta, *Tribun* justru mendapat simpati dari masyarakat Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan oplah *Tribun* yang sudah mencapai angka lebih dari 50.000 per harinya. Berdasarkan wawancara dengan pihak redaksi, oplah ini meningkat sejak Mei 2014.

Penelitian ini menggunakan perangkat metodologi analisis framing Robert N. Entman dengan menggunakan dua dimensi, yakni seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari isu. Untuk melihat bagaimana dimensi framing ini bekerja dalam sebuah berita, maka Entman membagi dalam empat elemen framing. Empat elemen framing tersebut adalah. Pertama adalah identifikasi masalah (*problem identification*) yakni peristiwa tersebut dilihat sebagai apa, apakah diberitakan dengan nilai positif atau negatif. Kedua, identifikasi penyebab masalah (*causal interpretation*) yakni siapa yang dianggap masalah dalam kasus tersebut. Ketiga, pada evaluasi moral (*moral evaluation*) yakni penilaian terhadap penyebab masalah. Keempat, saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*) yakni penawaran suatu cara penanganan masalah oleh media. (Sobur, 2004: 172).

Objek penelitian ini adalah berita korupsi dana Persiba yang melibatkan

Idham Samawi. *Time frame* berita yang diteliti adalah sejak Idham Samawi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi DIY pada 19 Juli 2013 hingga berita pasca protes dari masyarakat yang dimulai pada 12 Maret 2015. Berikut judul berita KR dan Tribun yang akan diteliti.

Tabel 1 Berita Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja soal Korupsi Dana Persiba

Tanggal Terbit	Berita di Kedaulatan Rakyat	Berita di Tribun Jogja
Selasa, 23 Juli 2013	Idham Tak Salah Aturan Caleg	Pencalegan Idham Harus Dianulir
Kamis, 25 Juli 2013	Kepemimpinan Idham Tetap Dibutuhkan	Persiba Butuh Dana Rp6M
Kamis, 12 Maret 2015	I Gede Sudiatmaja Gantikan Loeke-Larasati, Kejati DIY akan obyektif dan proporsional	Kajati Sudiatmaja Didesak Hentikan Penyidikan Idham
Jumat, 13 Maret 2015	Haryadi: Idham Tak Layak Jadi Tersangka	Warga Laporkan Penyidik Kejati
Rabu, 18 Maret 2015	Terkait Status Idham Samawi, Aspirasi Petani Ikut Tersandera	Idham Tak Ajukan Praperadilan
Jumat, 20 Maret 2015	Soal Idham rela Berkorban di Olahraga, "Kawula" Bantul bela pernyataan Haryadi.	Haryadi Dilaporkan ke KPK

PEMBAHASAN FRAMING BERITA "Korupsi Dana Persiba" di *KEDAULATAN RAKYAT* dan *TRIBUN JOGJA* PADA LEVEL TEKS

Berdasarkan enam berita yang diteliti, framing besar dari berita KR soal Idham Samawi adalah Idham bukanlah tersangka dari korupsi dana Persiba. Idham justru adalah sosok yang berguna bagi kemajuan Persiba. Lewat Idham

Samawi-lah, Persiba banyak mendapatkan prestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Bahkan KR pun memuat berita mendalam soal prestasi Idham pada Persiba. Framing berita KR sangat menyosokkan Idham sebagai pihak yang tak bersalah. Narasumber yang dihadirkan adalah mereka yang membela Idham. Dari enam berita yang diteliti, sama sekali tidak ada pernyataan yang menyudutkan Idham. *Tone* pemberitaan positif ditemukan dalam semua berita terkait korupsi dana Persiba.

Penetapan Idham sebagai tersangka dinilai tidak tepat. KR menilai kejaksaan perlu meninjau kembali penetapan ini. KR justru menuding banyak pihak bahwa ada kriminalisasi dan politisasi pada kasus Idham. Oleh karena itu, KR justru menggalang opini publik, agar kasus Idham ini mendapat SP3.

Berdasarkan enam berita yang diteliti, Tribun berada di posisi tengah-tengah antara membela atau tidak membela Idham Samawi. Tribun menampilkan fakta bahwa Idham terlibat kasus korupsi sehingga ia tidak layak diajukan caleg. Namun, Tribun juga menunjukkan bahwa kasus Idham ini membuat pihak lain khususnya manajemen Persiba juga terguncang tanpa Idham. Di sisi lain, Tribun juga memberikan fakta bahwa ketika kasus Idham ini tidak dikawal, maka banyak pihak lain juga (seperti Jaringan Anti Korupsi) akan dirugikan juga. Tribun lebih banyak menampilkan bukti sosial dan hukum untuk menilai kasus ini. Narasumber yang dihadirkan juga coverboth sides sehingga masyarakat tidak bisa menyalahkan sepenuhnya atas tindakan Idham.

FRAMING BERITA “Korupsi Dana Persiba” di *KEDAULATAN RAKYAT* dan *TRIBUN JOGJA* PADA LEVEL KONTEKS

Untuk analisis level konteks ini, peneliti tidak akan membahas satu persatu aspek seperti yang tertuang dalam lingkaran Reese dan Shoemaker. Penelitian ini memiliki kelemahan yaitu tidak bisa melakukan wawancara dengan individu jurnalis, namun hanya pada pemimpin redaksi yaitu Octo Lampito. Berdasar wawancara dengan pimpinan redaksi, peneliti hanya akan membedah dari level rutinitas media, organisasi, ekstramedia dan ideologi yang mempengaruhi pemberitaan Idham Samawi.

Dari sejarahnya, koran KR berpijak pada pers Pancasila. Wonohito sebagai pendiri KR, menyatakan KR memiliki tugas dan tanggungjawab besar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Kesejahteraan ini terwujud manakala KR bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi media ini merujuk pada fungsi dasar media yaitu sebagai sarana informasi, hiburan, pengawasan, pendidikan, serta transmisi budaya. Tentu saja aspek lokalitas menjadi hal utama dalam pemberitaan KR.

Dari ideologi pers Pancasila ini, Octo menyatakan pemberitaan KR sangat *pro* terhadap rakyat. Bentuk bentuk ketertindasan terhadap rakyat lebih banyak diungkapkan oleh KR. Oleh karena itu, kata Octo, pemberitaan akan lebih banyak menampilkan narasumber dari rakyat.

Untuk menerapkan pers Pancasila ini, KR juga menggunakan pendekatan budaya Jawa dalam menampilkan pemberitaannya. Budaya Jawa ini seperti menyampaikan sesuatu dengan pelan-pelan namun mengena. Hal ini disampaikan Octo sebagai berikut.

“Pendekatan saya *“ngantem”* tapi jangan keras, yang penting kena, dengan bahasa. Kalau kami hidup di Surabaya mungkin akan lain, kalau di Jakarta juga akan lain, tapi ini kami harus berhadapan dengan mayoritas Jawa. Pesannya adalah untuk menjaga Jogja dengan *“mipunani tumraping liyan”*, harus bisa bermanfaat bagi orang Jogja dan sekitarnya. (Octo, wawancara, April 2015)

Berdasarkan kutipan di atas, pemberitaan KR terlihat lebih landai ketimbang berita dari media lain yang lebih kritis. Menurut Octo, ketika KR terlalu kritis menyoroti sesuatu, maka pembaca enggan akan membaca KR. Diakui oleh Octo bahwa KR masih mendapat peringkat tertinggi oplah di Yogyakarta atau sekitar 400 ribu per hari, dikarenakan berita yang dimunculkan banyak menggunakan bahasa yang landai, tidak keras. Isunya pun banyak menyentuh persoalan-persoalan langsung dalam masyarakat. Ia mencontohkan soal Cebongan. Octo menyatakan KR tidak membela Kopasus, namun membela rakyat yang tertindas karena perbuatan kriminal oleh Decky CS.

Pada persoalan Idham Samawi, Octo mengatakan bahwa faktor kedudukan Idham sebagai penasehat tidak mempengaruhi pemberitaan. Meski sebutan Idham adalah “bapak”, namun Octo membantah Idham melakukan intervensi pada pemberitaan. Hanya saja Idham “memperingatkan” KR bahwa ia belum divonis. Berikut kutipan wawancaranya,

“Dia bilang silakan memberitakan, tapi dia bilang juga jangan lupa bahwa dia belum divonis. Dia memberikan kebebasan, tapi kami juga harus hati-hati karena kami tidak mau membuat orang celaka seumur hidup.” (Octo, wawancara, April 2015)

Octo juga menegaskan dalam kutipan sebagai berikut.

“Mungkin juga begitu, tapi jangan lupa saya menjaga sekali, kalau belum tersangka belum saya beritakan jika belum tertentu bersalah. Kasihan keluarganya, kasihan publiknya, kasihan bisnisnya.” (Octo, wawancara, April 2015)

Berdasar kutipan di atas, peneliti menduga peringatan Idham bahwa ia belum divonis merupakan bentuk kekhawatiran dari Idham. Idham berusaha untuk mempengaruhi kebijakan redaksional secara tidak langsung. Hal ini terungkap dari pernyataan Octo bahwa jangan pernah membuat orang celaka seumur hidup di kutipan terakhirnya. Hal ini menandakan KR tampak hati-hati sekali membingkai pemberitaan Idham. Bahkan Octo sendiri menyebutkan bahwa berita Idham akan berdampak bagi keluarga, publik Idham serta bisnisnya. Hal ini menandakan pula bahwa KR ingin menggiring opini publik bahwa Idham tak layak dijadikan tersangka.

Kehati-hatian pemberitaan Idham sangat terlihat ketika KR memilih narasumber yang pro Idham. Bahkan KR melakukan liputan khusus soal Persiba dimana seluruh isi beritanya sangat memihak Idham. Idham disosokkan sebagai pahlawan dalam Persiba sehingga tak layak dijadikan tersangka. Bahkan dijelaskan oleh KR, Idham “terpaksa” melakukan korupsi (mengambil uang negara) karena untuk membiayai Persiba.

Octo pun menanggapi pemberitaan di berbagai media khususnya media lokal soal Idham. Media lain selain KR tampak menyudutkan Idham. Ia menyebut inilah kelemahan media yang disebut *trial by the press* atau asas praduga tak bersalah. Ia mengatakan KR tidak ingin asas praduga tak bersalah terhadap Idham Samawi, dengan asumsi Idham belum divonis. Bagi Octo, KR harus memaparkan fakta

yang sesungguhnya tanpa menghakimi Idham. Hal ini diungkapkan Octo dalam kutipan sebagai berikut.

“Pertimbangan kita karena belum salah. Kecuali Pak Idham tersangka korupsi dan terbukti divonis, mungkin kami akan ditekan. Andaikan itu sudah sangkaan negatif, itu bisa dituntut media-media itu.” (Octo, wawancara, April 2015)

Berdasarkan kutipan tersebut, tampak terlihat faktor organisasi khususnya penasehat sangat berpengaruh dalam kebijakan redaksional media. Lebih lagi ketika penasehat tersangkut persoalan korupsi, KR sendiri sangat berhati-hati dalam menampilkan fakta. Bahkan akhirnya fakta yang dimunculkan justru banyak yang mengandung *tone* positif atas Idham dengan narasumber yang tidak *coverboth sides*.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak bisa melakukan wawancara langsung dengan individu jurnalis yang menulis berita soal Idham. Peneliti hanya bisa melakukan wawancara dengan Krisna Sumargo sebagai Pemimpin Redaksi Tribun Jogja. Wawancara dilakukan di Tribun Jogja pada Rabu, 13 Juli 2016. Berdasarkan hasil wawancara dengan Krisna, terdapat beberapa jawaban yang dapat melengkapi level teks.

Krisna menyatakan Tribun Jogja lebih leluasa untuk melakukan framing pemberitaan soal Idham. Hal ini disebabkan karena Tribun Jogja tidak memiliki afiliasi politik dengan pihak mana pun. Terkait dengan kebijakan redaksional atas berita-berita politik seperti kasus korupsi, Tribun mencoba untuk menempatkan sebagai media yang ikut memberantas korupsi seperti di level nasional. Lebih lagi ketika kasus korupsi tersebut melibatkan *public figure*, Tribun ingin menempatkan isu korupsi dengan baik agar masyarakat, pemerintah, serta

pihak lain yang berkaitan bisa belajar atas kasus tersebut.

Kaitannya dengan kasus Persiba, Krisna menyebutkan bahwa peristiwa ini layak diangkat karena memiliki nilai berita. Nilai berita dalam peristiwa ini adalah penting (menyangkut persoalan korupsi yang menggunakan dana negara (APBD)), aktual, *proximity* (aspek lokalitas), dan *prominence* (menyangkut Idham sebagai seorang *public figure*). Persoalan nilai berita inilah yang membuat Tribun mengawal kasus Idham. Hal ini disampaikan Krisna sebagai berikut.

Penggunaan APBD untuk Persiba, kembali ke konsen Tribun untuk menempatkan kasus ini sebaik-baiknya. Ada pertimbangan selain konteks hukum, tetapi juga lokalitas. Kasus ini melibatkan pejabat publik dan kepentingan banyak orang. (Krisna, wawancara, 15 Juli 2016).

Hanya saja, Krisna mengaku untuk mengemas berita Idham ini, terjadi dinamika dalam redaksi. Perdebatan yang terjadi berkaitan dengan *frame setting* yang akan dimunculkan oleh Tribun. *Frame setting* ini berkaitan dengan penggunaan diksi yang diperhalus, judul yang tidak terlalu keras, dan bahasa dalam tubuh berita yang tidak terlalu menyudutkan. Krisna mengatakan, kebijakan redaksional atas penggunaan diksi sangat penting dilakukan oleh Tribun Jogja. Hal ini dilakukan untuk menghormati Idham Samawi yang masih berstatus tersangka. Tribun tidak ingin melukai perasaan Idham bahkan keluarga korban. Hal ini disampaikan dalam kutipan sebagai berikut.

Tribun hanya memperhatikan cara mengemasnya. Apakah kita menggunakan diksi agar tidak menimbulkan ketersinggungan. Pilihan judul hasil pergulatan di redaksi. Bagaimana pesannya sampai

tetapi tidak terlalu menyodok. Karena apapun faktanya beliau sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kita mencoba memilih diksi yang diperhalus dan masih relevan dengan konsep penyajian kita. (Krisna, wawancara, 15 Juli 2016).

Tak hanya persoalan ketersinggungan, namun Tribun Jogja menggunakan diksi yang diperhalus dengan pertimbangan konteks budaya Jogja. Masyarakat Jogja, khususnya, tidak suka membaca berita yang lugas dan menohok. Karenanya, rasa tepaslira tetap harus dipertimbangkan Tribun Jogja dalam mengemas berita Idham. Pertimbangannya adalah persoalan Idham sebagai *public figure* dan kasusnya menyangkut kepentingan banyak orang.

Penghalusan diksi inilah yang akhirnya membentuk dua *frame* Tribun dalam mengemas kasus Idham. *Frame* pertama adalah memaparkan fakta pada publik bahwa Idham adalah tersangka. Tribun tidak melakukan asumsi praduga tak bersalah karena menurut Tribun fakta Idham sebagai tersangka sudah terurai dalam fakta persidangan. *Frame* kedua Tribun adalah meski Idham ditetapkan sebagai tersangka, namun Idham tidak ditinggalkan oleh partainya (PDIP) serta para penggemarnya (Persiba).

Kedua *frame* inilah yang digunakan Tribun untuk mengawal kasus Idham Samawi. Krisna pun menyatakan Tribun tidak melakukan pendekatan investigasi untuk mencari-cari kesalahan Idham. Tribun hanya memaparkan fakta persidangan dan fakta publik yang mewarnai kasus Idham. Proses verifikasi tetap dilakukan sepanjang fakta yang diperlukan kurang kuat.

Kedua *frame* inilah yang akhirnya terbukti dalam level teks yang diteliti oleh peneliti. Tribun berada dalam posisi netral dan hanya memaparkan fakta yang terjadi

tanpa rasa sungkan pada sesama media ataupun tersangka.

Media Lokal dalam Membingkai Kasus Korupsi

Kasus korupsi yang menjadi isu seksi di media ternyata belum tentu dibingkai dengan sebaik-baiknya oleh media lokal. Persoalan nilai berita penting atau berpengaruh pada kepentingan banyak orang akhirnya menjadi kalah dengan faktor-faktor di luar media. Persoalan Idham Samawi menjadi bukti bagaimana media lokal melakukan framing atas kasus ini.

Keterikatan media dengan perseorangan atau individu tertentu ternyata sangat berpengaruh dalam melakukan framing berita. Perasaan "sungkan" mewarnai dinamika redaksi untuk mengemas kasus korupsi. Tentunya media dengan afiliasi tertentu akan mengalami perdebatan yang luar biasa untuk melakukan framing berita korupsi terlebih yang menyangkut afiliasinya.

Media lokal *Kedaulatan Rakyat* yang kental populer memiliki kedekatan dengan Idham Samawi terbukti bahwa mengemas berita korupsi Idham dari sudut pandang prestasi Idham di Persiba. KR memberikan nada positif hampir dalam seluruh pemberitaannya. Meski terpapar dalam fakta persidangan bahwa Idham adalah tersangka, namun KR menyatakan status tersangka adalah status yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. KR berusaha membangun opini pembaca dengan memberikan fakta lain di luar mengapa Idham bersalah, melainkan bagaimana perjuangan Idham untuk menyelamatkan Persiba dengan dana korupsi tersebut.

Menurut peneliti persoalan keredaksian KR dalam membingkai kasus ini lebih dipengaruhi oleh kedudukan Idham sebagai penasehat KR. Hal ini

terbukti bahwa faktor organisasi sangat berpengaruh pada isi media. Kefaktualan akan fakta akhirnya menjadi nomor dua demi menyelamatkan organisasi.

Berdasar hasil penelitian, berita Idham pun tidak pernah ditempatkan di halaman utama atau depan. Berita Idham justru berada diberikan di halaman dalam bahkan ada halaman khusus yang membahas Idham dengan Persiba. Penempatan ini tentu saja menandakan bahwa KR tidak menganggap berita ini sebagai berita penting yang harus disampaikan masyarakat. Pasalnya, ketika berita ditempatkan di halaman utama, sebuah media akan menganggap bahwa berita tersebut adalah berita penting dan harus segera diberitakan. Ketika di halaman utama pula, masyarakat cenderung akan membaca ketimbang halaman dalam.

Sementara itu, media lokal Tribun cenderung lebih leluasa dalam mengemas kasus Idham. Tidak adanya keterikatan dengan pihak manapun membuat Tribun lebih bisa menempatkan kasus korupsi ini di halaman utama ataupun halaman depan. Tribun juga mengaku bahwa berita korupsi adalah berita yang memiliki nilai berita penting sehingga harus diinformasikan pada masyarakat. Lebih lagi ketika korupsi tersebut menyangkut pejabat publik.

Hanya saja media lokal apapun seperti Tribun tetap harus mempertimbangkan konteks budaya Jogja yang memang tidak suka dengan bahasa keras dan lugas. Konteks budaya Jogja harus mempertimbangkan *tepaslira* dalam membingkai sebuah kasus sensitif, seperti kasus Idham. Dapat diketahui Idham adalah mantan bupati Bantul dalam dua periode berturut-turut dan sampai saat ini kekuasaannya masih berjalan dengan dilanjutkan oleh istrinya. Hal ini menjadi pertimbangan Tribun untuk mengemas

beritanya. Ketika terlalu keras, Tribun sebagai pendatang baru akan ditinggalkan pembaca.

• KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam membongkai kasus korupsi, ada pertimbangan-pertimbangan yang diperhatikan media lokal dalam melakukan pengemasannya.

1. Persoalan afiliasi atau kedekatan dengan pihak tertentu berpengaruh dalam pengemasan berita. Dalam teori Reese dan Shoemaker, faktor organisasi media terbukti berpengaruh mempengaruhi isi berita. Media lokal yang memiliki kedekatan dengan pihak tertentu, cenderung akan menampilkan berita dengan nada positif, meski berita korupsi sekalipun. Media lokal yang tidak memiliki afiliasi apapun cenderung bebas dalam melakukan framing pemberitaan.
2. Pengemasan berita korupsi yang melibatkan pejabat publik khususnya di Yogyakarta tetap mempertimbangkan konteks budaya lokal Yogyakarta. Pertimbangan masyarakat yang *ewuh pakewuh, tepaslira* mewarnai dinamika redaksional untuk memilih diksi, judul, serta isi berita yang halus. Pengemasan tersebut berpengaruh pada keinginan pembaca untuk sebuah berita.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah dari segi analisis data yang digunakan. Analisis data dengan menggunakan model

framing Robert Entman kurang bisa menunjukkan secara detail penggunaan diksi, unsur 5W+1H, serta struktur-struktur berita lainnya. Peneliti menyarankan untuk menggunakan model analisis framing yang berbeda seperti Pan Kosicki dan Gamson. Model ini lebih bisa menjawab dengan jelas secara teks terkait penggunaan bahasa sebuah media atas peristiwa tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa "Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita – berita Politik"*. Jakarta: Granit.
- Shoemaker, Pamela J. and Stephen D. Reese. 1996. *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content. 2nd Edition*. USA : Logman Publisher.
- Simarmata, Salvatore. 2014. *Media dan Politik*. Jakarta: Buku Obor.
- Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa*. Yogyakarta : LP3Y.
- Sobur, Alex. 2004. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Wonohito, 1986. *Pers Pancasila*. Edisi 2. Yogyakarta : PT BP Kedaulatan Rakyat.
Tribunjogja.com